

Partisipasi Umat Kristen Indonesia di Bidang Politik

oleh Zakaria J. Ngelow

"Ketinggian Nama Toehan itoelah toedjoean jang terachir dari segala machloek dan segala oesaha manoesia, djoega didalam lapangan politiek. Politiek Kristen tidak semata-mata ditoedjoean pada keoentoengan doeniawi, bagi politiek Kristen jang mendjadi oekoeran kebesarannja boekanlah hasil doeniawi jang diperoleh, akan tetapi apakah didalam segala oesahanja itoe partij mengandjoeran, mempertahankan dan menjalankan azas2 dari Firman Toehan." (Ds. Basoeki Probowinoto, 1945)

Partisipasi Transformatif

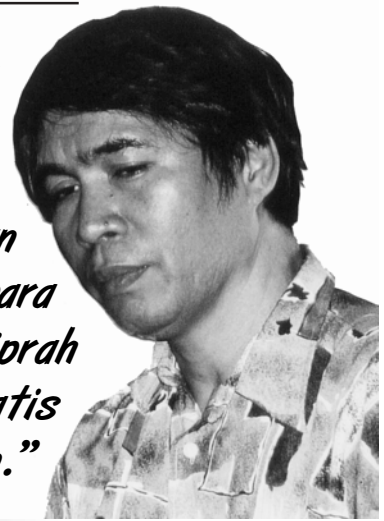
Dalam hubungan gereja dan negara, kata "partisipasi" bisa bermakna positif, bisa pula negatif. Positif, karena menunjukkan keikutsertaan, keterlibatan atau peran gereja dalam dinamika perkembangan kehidupan nasional. Negatif, kalau substansi peran gereja hanyalah ikut atau sekadar hadir tanpa bobot yang "memberi nilai tambah" terhadap perkembangan kehidupan nasional. Dengan kata lain, perlu dibedakan antara partisipasi yang kontributif-transformatif dengan partisipasi yang sekedar ikut-ikutan, turut ramai, membebek. Dari sudut pandang misi gereja, partisipasi Kristen semestinya bersifat positif, kontributif dan transformatif. Dengan sifat itulah diperkembangkan pendekatan partisipasi positif-kreatif, kritis-realistik terhadap pembangunan nasional yang dirumuskan dalam Konperensi Gereja dan Masyarakat tahun 1971 di Klender, Jakarta.

Partisipasi gereja yang transformatif, dapat menjadi ukuran dalam evaluasi teologis sejarah partisipasi Kristen di Indonesia. Artinya, kita tidak sekadar bangga punya tokoh-tokoh beragama Kristen, atau lembaga-lembaga Kristen dalam sejarah politik nasional kita. Perlu dipertanyakan substansi apa yang merupakan kontribusi para tokoh atau lembaga-lembaga itu dalam kiprah perannya. Predikat Kristen tidak otomatis membuktikan adanya partisipasi Kristen.

Selanjutnya, substansi partisipasi transformatif masih perlu dijabarkan dengan memberinya dasar atau acuan teologis-alkitabiah mengenai visai dan misi Kristen dalam dunia, khususnya di bidang politik. Dalam kaitan dengan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, kesaksian Alkitab mengenai kewajiban orang beriman, umat Allah, adalah mengembangkan kehidupan bersama dalam persaudaraan semua orang sebagai ciptaan Allah, di mana kasih dan keadilan dipraktekkan untuk mewujudkan *shaloom*, damai-sejahtera, yang mencakup semua orang dan semesta ciptaan.

Ada berbagai bidang partisipasi sosial di mana partisipasi politik salah satu yang terpenting, karena terkait dengan kekuasaan untuk mengatur masyarakat. Partisipasi politik di sini diartikan secara sederhana sebagai upaya-upaya sistematis dan terorganisir untuk (turut) menentukan visi, tujuan, sistem, aturan dan program, pengawasan serta pelaksana dalam kehidupan bersama sebagai suatu bangsa. Dalam kaitan itu, partisipasi politik dilakukan

"Partisipasi gereja yang transformatif ... tidak sekadar bangga punya tokoh-tokoh beragama Kristen, atau lembaga-lembaga Kristen dalam sejarah politik nasional kita. Perlu dipertanyakan substansi apa yang merupakan kontribusi para tokoh atau lembaga-lembaga itu dalam kiprah perannya. Predikat Kristen tidak otomatis membuktikan adanya partisipasi Kristen."



melalui sistem kelembagaan sosial politik yang mempengaruhi baik sistem, fungsi dan kebijakan pemerintahan secara langsung, maupun dalam aktivitas komunitas dan perorangan di luar organisasi politik yang bermakna bagi dinamika kehidupan berbangsa.

Pengantar ini terutama mengemukakan gagasan-gagasan dalam partisipasi politik Kristen di Indonesia, yang sudah dijalankan sejak zaman pergerakan nasional, baik di dalam partai politik Kristen atau sekuler, maupun di luar partai politik.

Pro-kolonial

Partisipasi politik Kristen di Indonesia berlangsung sejak gagasan Indonesia yang bersatu dan merdeka diperjuangkan dalam pergerakan nasional. Hubungan dan sikap gereja terhadap VOC dan pemerintah Kolonial Belanda sebelumnya belum mempunyai bobot partisipasi politik, walaupun mempunyai maknanya sendiri dalam formasi Kekristenan di Indonesia. Pada masa pergerakan nasional partisipasi politik Kristen segera diwujudkan ketika pemerintah kolonial memberi peluang bagi adanya kekuatan-kekuatan politik masyarakat di Indonesia untuk turut menentukan kebijakan pemerintah kolonial dengan pembentukan Volksraad (Dewan Rakyat) pada tahun 1917. Sebelum itu memang telah berkembang kekuatan-kekuatan masyarakat dalam berbagai organisasi kemasyarakatan yang berusaha memajukan diri dalam kerangka Politik Etis pemerintah kolonial. Kalangan Kristen mula-mula menghimpun kekuatannya dalam organisasi-organisasi kesukuan yang terbuka kepada kebersamaan dengan warga non-Kristen, sebagaimana a.l. dalam ormas-ormas Minahasa, Maluku dan Batak. Penekanannya pun belum politik secara langsung, melainkan emansipasi sosial dan ekonomi.

Partai politik Kristen pertama di Indonesia CEP (Christelijk Etische Partij kemudian menjadi CSP, Christelijk Staatkundige Partij) dibentuk kalangan Kristen Belanda dan kemudian melibatkan beberapa tokoh-tokoh Kristen Indonesia (a.l. R.M. Notosoetarso, T.S.G. Mulia, Rehatta). Pandangan politik CEP terhadap hubungan kolonial adalah mendukung gagasan perwalian, yakni bahwa hubungan kolonial adalah kehendak Tuhan dalam sejarah yang memberi kewajiban kepada Negeri Belanda untuk membimbing rakyat pribumi menuju kemandirian tanah jajahan yang tetap terikat dengan Negeri Belanda.

Wawasannya pro-kolonial itu tidak memuaskan

kalangan progresif Kristen Indonesia yang mendukung perjuangan kemerdekaan, yang kemudian bergabung dengan partai-partai sekuler. Kalangan "Kristen pribumi" dalam CSP memisahkan diri namun tidak berkembang karena tanpa perubahan visi politik pro-kolonial, dan karena batas-batas etnis yang masih sangat kental. Sumbangan positif partai Kristen yang didominasi orang Belanda ini adalah sekadar tempat latihan berpolitik, sebagaimana juga Volksraad bagi banyak politisi Indonesia dari golongan *co-operatie* (yang bekerjasama dengan pemerintah kolonial dalam memperjuangkan masa depan Indonesia).

Kalangan intelektual muda Kristen dalam lingkaran gerakan mahasiswa Kristen (CSV, Christen Studenten Vereeniging) memperoleh pengarahannya dari sejumlah tokoh Kristen Belanda yang progresif untuk memihak pada pergerakan nasional memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Mereka antara lain Amir Sjarifuddin (1905-1948) dan J. Leimena (1905-1977). Dalam kiprahnya, mereka terbagi atas yang berpartisipasi di bidang politik melalui partai politik Kristen dan yang memilih partai politik sekuler. Memang sejak masa pergerakan nasional ditempuh berbagai jalur partisipasi politik, di dalam dan di luar partai Kristen. Politikus ulung seperti Amir Sjarifuddin justru memilih berkiprah di dalam lingkaran sosialis-komunis.

Piagam Jakarta

Peristiwa terpenting dalam partisipasi politik Kristen berkaitan dengan proses penyusunan UUD menuju Indonesia merdeka pada tahun 1945. Dalam panitia kecil PPKI untuk draft Pembukaan UUD berhadapan kaum nasionalis sekuler dengan nasionalis Islam, yang masing-masing memperjuangkan suatu dasar negara, demokrasi sekuler atau Islam. Kesepakatan dicapai pada 22 Juni 1945 dalam bentuk kompromi yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta. Menjelang UUD disahkan fihak pemuka Kristen (Protestan dan Katolik) dari Indonesia bagian Timur menyampaikan keberatan dengan ancaman separatistis: menolak bergabung dengan NKRI jika tetap dipertahankan sistem hukum dualistik dalam konsep Pembukaan UUD itu. Atas dukungan fihak nasionalis dan persetujuan pemuka-pemuka Islam, mereka mengubah rumusan sila Ketuhanan dengan tujuh kata (kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya) menjadi 3 kata (Yang Maha Esa) dalam sila pertama Pancasila. Peristiwa itu menjadi tonggak penting dalam sejarah partisipasi politik Kristen. Selain merupakan penekanan pokok dalam gagasan-gagasan politik Kristen mengenai pluralitas dan kebebasan



beragama, perumusan ulang Pembukaan itu menjadi acuan komitmen politik Kristen: menentang Islamisasi ideologi dan sistem politik nasional. Alasan dasarnya adalah anti diskriminasi dan demi penegakan negara kesatuan yang demokratis.

Pembentukan Partai Kristen Indonesia (Parkindo) pada tahun 1945 merupakan kelanjutan gagasan-gagasan pembentukan suatu partai Kristen menuju Indonesia merdeka yang dibahas dalam Konperensi Perhimpunan Zending di Karangpandan, Solo, bulan Oktober tahun 1941, setelah kegagalan partai-partai Kristen pribumi yang memisahkan diri dari CSP (PKC, CAV, PKMI). Ketika itu Amir Sjarifuddin mengarahkan supaya kalangan Kristen Indonesia turut berpartisipasi dalam gerakan nasionalisme dengan visi dan ideologinya sendiri, walaupun Amir tidak antusias mendukung pembentukan suatu partai politik Kristen. Parkindo pada awalnya terutama memobilisasi dukungan umat Kristen dan gereja-gereja terhadap kemerdekaan Indonesia.

Ideologi Kuyperian?

Pada umumnya "teologi politik" Kristen Indonesia sejak awal berada di bawah pengaruh pandangan-pandangan politik Kristen Neo-Kalvinis yang berkembang di Negeri Belanda, khususnya yang digagas oleh Abraham Kuyper (1837-1920), teolog dan negarawan Belanda dan pemimpin Anti Revolutionaire Partij (ARP). Kuyper menekankan keharusan adanya suatu partai politik Kristen untuk menjalankan partisipasi politik Kristen. Di Negeri Belanda berkembang pola organisasi sosial "verzuiling" (*pillarization*), sesuai dengan pluralitas masyarakat (dalam arti berbagai kelompok berbeda yang terkotak-kotak secara vertikal menurut ideologi). Setiap kelompok (termasuk kelompok-kelompok kegerejaan) mempunyai masyarakatnya sendiri dengan upaya-upaya pengembangan kemajuannya. Penerbitan tersendiri, universitas sendiri, dst.

Dengan membina kekuatan politik sendiri, Parkindo memperjuangkan prinsip-prinsip politik menyangkut kekuasaan dan hakekat negara serta fungsi pemerintah, yang keseluruhannya diletakkan dalam perspektif teologi Kalvinis mengenai kedaulatan Allah. Dalam Anggaran Dasarnya Parkindo menegaskan sentralitas kedaulatan Allah dan kehendak-Nya dalam berbagai bidang kehidupan. "PARKINDO adalah partai politik warga negara Indonesia yang berhasrat memenuhi panggilannya terhadap nusa dan bangsa dan kewajibannya terhadap bangsa-bangsa lain dengan jalan berusaha di lapangan politik, ekonomi dan sosial atas dasar faham Kekristenan" (AD 1945 Pasal 3).

Pemikiran politik Kuyper yang dewasa ini banyak diulas relevansinya (a.l. di Amerika Serikat) disebut sebagai "jalan ketiga" (the third way) antara ideologi kedaulatan rakyat dan ideologi kedaulatan negara (dengan revisi sosialismenya). Ia menolak kedua ideologi itu dan mengedepankan suatu ideologi yang berdasar pada paham Kalvinis mengenai

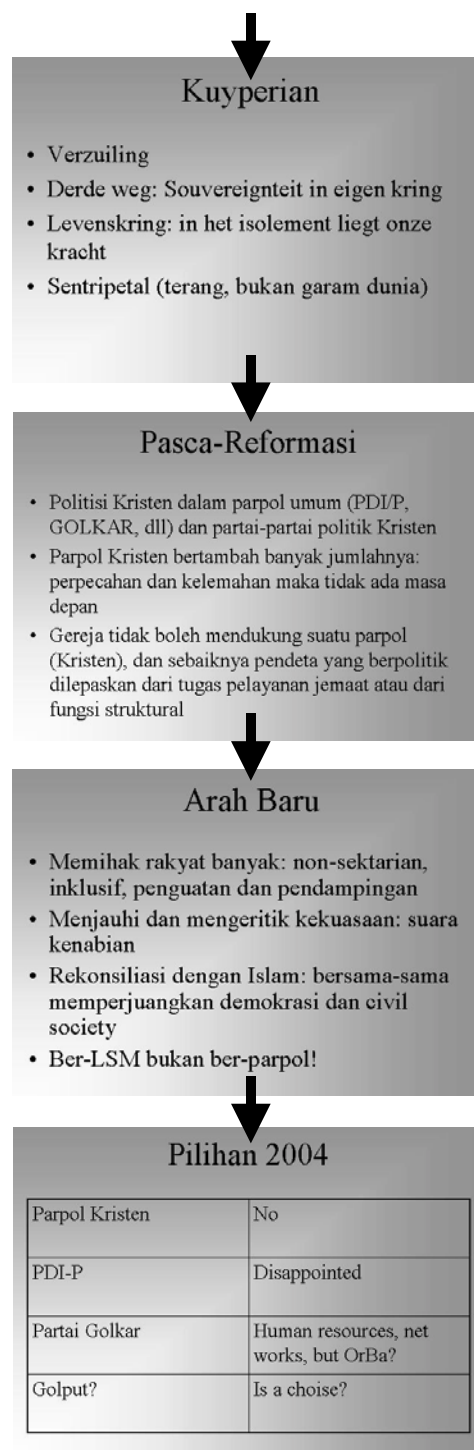


kedaulatan Allah sebagai sumber segala kekuasaan pemerintahan negara, yang dihubungkan dengan adanya dosa di dalam ciptaan. "Sekiranya dosa tidak masuk dalam kehidupan manusia maka kesatuan organik umat manusia akan terpelihara, namun akibat Kejatuhan maka Allah melembagakan otoritas sipil sebagai cara untuk mengamankan potensi anarki." Apapun bentuk negara, kekuasaannya berasal dari dan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Inti jalan ketiga Kuyper yang disebutnya *souvereiniteit in eigen kring* (*sovereignty in the individual social spheres*, kedaulatan dalam lingkup sosial masing-masing) dapat disebut sebagai *ideologi kedaulatan Ilahi* yang diberikan kepada manusia untuk dipertanggungjawabkan kepada-Nya. Dalam hal itu ia menganjurkan pembaharuan Kristen yang mendalam dan berkesinambungan dalam semua bidang kehidupan, serta pentingnya politik dan pemerintahan sebagai arena tanggung jawab Kristen. Klaim ketuhanan Kristus atas seluruh dunia diterjemahkan ke dalam berbagai bidang peran seperti jurnalisme, pendidikan tinggi, dan sebagainya yang dikembangkan dalam masing-masing golongan. Gagasan tanggungjawab ini kemudian muncul dalam DGD sebagai *responsible society*, yang kemudian dikenal di Indonesia sebagai "kewarganegaraan yang bertanggungjawab".

Kuyper menambahkan makna kedua dalam ide *sphere sovereignty*, yakni kebebasan kelompok-kelompok konfessional atau ideologis dalam masyarakat untuk mengorganisir lembaga-lembaga otonomnya. Ia menganjurkan kelompoknya untuk memisahkan diri dari masyarakat dengan mengembangkan suatu lingkup hidup tersendiri (*levenskring*). "Kita ingin mundur ke balik tembok-tembok pemisah kita demi mempersiapkan diri untuk perjuangan ke depan" katanya, mengikuti semboyan mentor politiknya, pendiri ARP, Groen van Prinsterer: "In het isolement liegt onze kracht" (Dalam isolasi terletak kekuatan kita). Pemaknaan itu memperkuat format polarisasi masyarakat zamannya.

Sekalipun berakar dalam faham kedaulatan Ilahi sebagai sumber kekuasaan, ideologi *souvereiniteit in eigen kring* bukanlah ideologi teokrasi. Ada yang menyebutnya jalan tengah antara demokrasi dan teokrasi. Ia mengedepankan suatu konsep demokrasi sebagai posisi ARP dalam menentang ide bahwa hanya kalangan orang kaya dalam masyarakat yang berhak menentukan nasib setiap orang. Demokrasi baginya berarti tidak ada bagian organik dari penduduk yang dibatasi dalam partisipasi pemerintahan.

Tokoh-tokoh zending Belanda, seperti J. Verkuyl (1908-2001) mengembangkan lebih lanjut teologi politik Kristen neo-Kalvinis Kuyperian itu di Indonesia. O. Notohamidjojo, salah seorang pendiri UKSW, mengemukakan acuannya dalam karangan-karangannya etika politik Kristennya, a.l. dalam Iman Kristen dan Politik (edisi I terbit tahun 1951).



Tinjauan Teologis

Powerpoint-presentation oleh Zakaria J. Ngelow tentang "Gereja dan Politik: Konteks Indonesia" pada Seminar Sehari Dies Natalis "Gereja & Politik" STT Intim Makassar, tgl 17 September 2003

Faham lain dalam politik Kristen di Belanda dikembangkan oleh teolog Belanda P.J. Hoedemaker, yang hidup sezaman Kuyper, yang menolak isolasi Kristen dalam lingkaran sosial tersendiri dan mendorong kehadiran kesaksian Kristen dalam semua bidang dan institusi sosial. Tidak perlu ada partai politik Kristen tersendiri atau universitas Kristen tersendiri. Perbedaan kedua aliran politik ini dapat diumpamakan Kuyper menjadi terang yang menarik orang dari kegelapan ke dalam lingkaran cahayanya (sentripetal), sedangkan Hoedemaker sebagai garam yang larut dan menggarami dunianya (sentrifugal). Keduanya lahir dan berkembang dalam konteks dinamika sosial-politik Negeri Belanda (dan Eropa pada umumnya) abad dekade-dekade akhir ke-19 dan awal ke-20, yang terpolarisasi dalam ideologi politik antara gagasan-gagasan demokrasi individual Revolusi Perancis dan filsafat kolektivisme Hegelian, dan dalam teologi antara liberalisme dan fundamentalisme Injili.

Minoritas Kreatif?

Dalam diskursus politik sejak zaman pergerakan kalangan Kristen Indonesia memberi perhatian pada kemajemukan dengan penekanan pada hak-hak yang sama dan dalam sistem pemerintahan demokrasi. Kebebasan beragama merupakan isu penting dalam lingkungan Kristen, dan partisipasi politik diarahkan pada perjuangan untuk membela pemisahan negara dan agama. Pada periode demokrasi liberal ketika Konstituante berusaha menyusun Konstitusi baru muncul pertarungan antara ideologi Pancasila atau ideologi Islam. Jelas pihak Kristen membela Pancasila. Di bawah kepemimpinan Mulia, Leimena, Tambunan dll masa itu sampai tahun 60-an dianggap masa jaya partisipasi politik Kristen melalui Parkindo, yang merupakan satu-satunya partai Kristen. Pada Pemilu tahun 1955 Parkindo mendapat 16 kursi di Konstituante dengan 1.003.326 suara (2,66%).

Pada awalnya tidak banyak dukungan kepada Parkindo. Pada rapat pembentukan partai Kristen (mula-mula namanya Partai Kristen Nasional, PKN), tgl 6 November 1945, berkembang pemahaman menentang adanya partai politik Kristen. Ds. Probowinoto (Ketua terpilih menggantikan W.Z. Johannes pada Kongres bulan Desember 1945) mengungkapkan 3 pandangan yang menolak: para politikus Kristen lebih baik menyebar dalam partai-partai sekuler yang programnya dapat diterima orang Kristen; umat Kristen terlalu lemah dari segi sumber daya; dan politik pekerjaan kotor yang tidak sesuai dengan Kekristenan. Pada thn 1952 Leimena menunjuk pada 3 kelompok orang-orang yang

mempertanyakan partisipasi Kristen dalam Indonesia merdeka: kelompok yang tidak mendukung kemerdekaan Indonesia; kelompok yang dibingungkan oleh keadaan masyarakat yang tidak menentu; dan kelompok yang mengasingkan diri dari urusan negara.

Parkindo menjadi wakil umat Kristen dalam dinamika percaturan politik nasional dari masa Revolusi, Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin sampai awal Orde Baru. Cukup mencolok bahwa Parkindo merupakan satu-satunya partai politik Kristen. Memang ada juga sejumlah intelektual atau politisi Kristen di luar kelembagaan gereja yang memilih aktivitas politiknya di luar Parkindo dalam partai-partai sekuler. PARKI (partai Kristen Indonesia) pimpinan Melanchton Siregar di Sumatera Utara menggabungkan diri ke Parkindo pada tahun 1947. Peran utama Parkindo dapat diletakkan dalam konteks sosial-politik dan kegerejaan masa itu. Pertama-tama struktur kepemimpinan gereja dan politik umat Kristen hampir berimpit dari pusat sampai ke jemaat-jemaat, khususnya dalam lingkungan DGI. Para pendeta, pimpinan gereja dan majelis jemaat sekaligus pengurus Parkindo. Sementara itu Kekristenan Indonesia belum secara tajam terbelah antara kaum ekumenis dan kaum Injili, dan masih cukup kuatnya patronase "gereja induk". Selain itu, juga karena rendahnya tingkat kecekikan politik umat Kristen sehingga gampang dieksploitasi secara emosional-primordial dari sudut agama. Dan sekalipun kepemimpinan gereja mengalami berbagai masalah, belum terjadi konflik serius yang mengarah ke perpecahan. Singkatnya, Parkindo mendapat dukungan langsung gereja-gereja dalam menghadirkan kesaksian Kristen dalam percaturan politik di Indonesia. Apakah Parkindo berhasil? Ketokohan para pimpinannya dalam pentas politik nasional, seperti a.l. J. Leimena, M. Tambunan, Ds. W.J. Rumambi dan A.M. Pasila mungkin dapat dibanggakan. Bagaimanapun, secara teologis harus diakui bahwa dengan segala kekurangannya Parkindo dan seluruh jajarannya di pusat dan di daerah telah dipakai Tuhan untuk membawa kesaksian Injil Kristus di tengah-tengah perjalanan sejarah bangsa kita.

Dalam pengakuan itu pertanyaan kritis tetap perlu diajukan. Apakah kesaksian Kristen oleh Parkindo dalam percaturan politik di Indonesia memang telah dijalankan dengan setia menyatakan suara kenabian terhadap berbagai ketimpangan dalam pemerintahan dan masyarakat? Apakah praktek-praktek kotor dunia politik tidak menulari para politikus Kristen? Apakah transformasi ke arah kehidupan nasional yang lebih adil dan demokratis

bagi semua terus diperjuangkan? Ataukah substansinya lebih pada perjuangan untuk kepentingan terbatas umat Kristen dalam bayang-bayang kecemasan terhadap diskriminasi kelompok-kelompok yang lebih kuat, khususnya Islam? Diperlukan studi yang lebih komprehensif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini.

Pertanyaan-pertanyaan itu perlu diletakkan dalam konteks dinamika sosial-politik nasional yang penuh tantangan. Dalam 25 tahun pertama kemerdekaan negara kita diperhadapkan pada berbagai tantangan dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan sampai terbentuknya pemerintahan Orde Baru. Separatisme RMS, pemberontakan DI/TII, Pemilu 1955, PRRI/PERMESTA, kemacetan Konstituante, Pembebasan Irian Barat, Dwikora, G30S/PKI dan peralihan kekuasaan ke pemerintah Orde Baru adalah rangkaian tantangan berat susul-menyusul yang turut membentuk karakter partisipasi politik umat Kristen Indonesia. Sementara secara internal gereja-gereja yang rata-rata baru mulai berdiri sendiri bergumul dengan masalah-masalah pengembangan jemaat, kader, sumber dana dan organisasi, sambil berusaha mewujudkan cita-cita keesaan gereja-gereja di Indonesia. Itulah ketegangan antara kemandirian dan keesaan gereja-gereja di Indonesia.

Ketegangan itu dijalani sambil mencari gagasan-gagasan partisipasi yang relevan. Selain gagasan-gagasan teologi politik Kuyperian yang dikemukakan di atas, wacana politik Kristen di Indonesia sejak tahun 1950-an mendapat masukan dari gerakan ekumene sedunia, yang antara lain memperlihatkan pengaruh Reinhold Niebuhr (1892-1971). Wacana *responsible society* DGD yang disinggung di atas diletakkan dalam perspektif *Christian realism* Niebuhr. Pada satu fihak Niebuhr menolak optimisme Social Gospel mengenai kebaikan manusia dan kemampuannya melaksanakan perintah Allah dalam semua bidang kehidupan, dan pada fihak lain mengandalkan kehadiran Allah yang memberi kemungkinan luas bagi manusia (*indeterminate possibilities*) mewujudkan hal-hal besar bagi-Nya. Kombinasi wacana masyarakat tanggung jawab dan realisme Kristen dibumbui suatu idealisme *creative minority*, mengikuti pandangan Arnold Toynbee (1889-1975). Sejarawan Inggris ternama itu menyatakan bahwa kemajuan dan kemunduran peradaban terjadi ketika tampil kaum minoritas kreatif yang mampu membaca tanda-tanda zaman, memahami tantangan dan peluang zamannya serta secara strategis memobilisasi masyarakatnya melakukan pembaharuan atau perubahan, dan karena itu mereka menjadi elit masyarakatnya.

Namun kemudian peradaban merosot ketika kelompok ini berubah menjadi *dominant minority* yang sibuk mempertahankan kekuasaannya. Wacana *creative minority* kemudian tidak dipopulerkan dalam lingkaran intelektual dan politisi Kristen Indonesia untuk menghindari dikotomi minoritas - mayoritas dalam masyarakat majemuk Indonesia, yang bisa mengarah pada ekse negatif pemahaman persatuan nasional. Alasan lain adalah meredam sindrom minoritas. Tetapi adanya kecenderungan yang dapat secara figuratif disebut "model peran Yusuf-Daniel" dalam kalangan intelektual dan pemimpin Kristen menunjukkan pengaruh gagasan itu, khususnya dalam *power-centric orientation* para intelektual dan pemimpin Kristen Indonesia. Di sini sebenarnya terjadi penyimpangan mendasar dari gagasan *creative minority*, yakni menjadi *dominant minority*, bukan menjalankan kepeloporan dalam membaca dan menjawab tanda-tanda zaman, melainkan masuk dalam lingkaran kekuasaan yang hakekatnya anti pembaharuan. Dengan kata lain, substansi partisipasi politik Kristen dikerdilkan menjadi perjuangan bagi kepentingan kelompok atau golongan, yang dalam konteks Indonesia merupakan perwujudan dari sindrom minoritas.

Dalam orientasi itu, kehadiran wakil-wakil Kristen di Parlemen dan Kabinet adalah prestasi yang sering dibanggakan. Perlu diperhatikan bahwa karena latar pendidikannya pada zaman kolonial, banyak orang Kristen menduduki jabatan-jabatan penting dalam birokrasi pemerintahan sampai awal tahun 1970-an. Juga kemudian pada tahun 1971 ketika Orde Baru menyederhakan kekuatan politik dengan mem-fusi Parkindo ke dalam PDI orang-orang Kristen masih hadir di Parlemen dan Kabinet. Bahkan dalam Orde Baru peran birokrat Kristen (Katolik dan Protestan) cukup penting, dengan adanya sejumlah tokoh kabinet dan pimpinan militer dan partai politik. Dengan kata lain, "hilangnya" Parkindo dari pentas politik tidak meniadakan kehadiran tokoh-tokoh Kristen di bidang pemerintahan, militer dan politik. Para politikus Kristen (a.l. eks Parkindo) tetap berkibrah dalam percaturan politik Orde Baru. Evaluasi negatif terhadap pemerintahan Suharto menimbulkan pertanyaan kritis, apakah partisipasi para tokoh-tokoh Kristen pada masa Orde Baru benar dapat dibanggakan?

Musa-Elia?

Berbeda dengan orientasi ke lingkaran elit kekuasaan, partisipasi Kristen *seharusnya* diperkembangkan ke arah tepian sosial: solidaritas dengan kaum marjinal, yang dalam ungkapan figuratif dapat disebut "model peran Musa-Elia" (yang

bertentangan atau saling melengkapi dengan model Yusuf-Daniel?). Perkembangan dalam gagasan-gagasan teologi gerakan ekumene mengenai peran gereja dalam masyarakat menunjukkan hal itu, yang berkembang dalam wacana dan praksis gereja-gereja, khususnya selama Orde Baru.

Konperensi Gereja dan Masyarakat (KGM) secara berkala dengan ketokohan almarhum Pak Sim (Dr. T.B. Simatupang) dan kemudian pembentukan Akademi Leimena dapat dilihat sebagai usaha-usaha kalangan Gereja Protestan untuk mengisi kekosongan tiadanya partai politik Kristen tersendiri. Pada KGM-DGI pertama tahun 1962 di Sukabumi disampaikan prinsip-prinsip teologis partisipasi gereja. Dalam suatu kertas kerja berjudul "Gereja dan Masyarakat di Indonesia" yang disusun oleh Komisi Gereja dan Masyarakat DGI, antara lain dikemukakan:

"Eksistensi Gereja terjalin dengan Injil Kerajaan Allah, yakni menjadi suatu fungsi dalam masa pemberitaan dan penantian kegenapan pemerintahan Allah yang telah mulai diwujudkan dalam kemenangan Yesus Kristus. Oleh karena Injil Kerajaan Allah bermakna *comprehensive* maka gereja harus menyatakannya di dalam semua lapangan kehidupan, baik pertobatan pribadi secara rohani maupun pembinaan masyarakat secara sosial, politik, ekonomi, dan seterusnya. Dalam fungsi ini gereja dapat tergoda untuk mengutamakan dirinya (*ecclesiocentrism*) atau memisahkan tuntutan-tuntutan konkret kehidupan masyarakat dari Injil sehingga terjerumus dalam sekularisme."

Partisipasi transformatif itu merujuk pada Gereja Purba sebagai model dan ukurannya:

"Jemaat Kristen purba merupakan model dan ukuran bagi peran Gereja di tengah-tengah masyarakat, yaitu bukan dengan suatu ideologi atau sistem sosial politik tertentu, melainkan dengan hidup dari dan di bawah kekuasaan Kristus mewujudkan kasih dan keadilan. Cara hidup gereja Kristen yang lama dalam masyarakat selama abad-abad yang pertama bukan konservatif, maupun evolusioner, atau revolusioner, melainkan *membetulkan* (mentransformasikan) dan karena itu *mengubah*. Gereja, yakni jemaat-jemaat, hanya dapat melancarkan pengaruh-pengaruh yang dinamis, yang membaharui dan mengubah itu dalam masyarakat jika gereja sadar akan masalah-masalah yang dihadapi dan jika gereja hidup dari penggenapan dan pengharapan akan Kerajaan Allah yang dalam Yesus Kristus telah dan akan datang itu."

Partisipasi Kristen masa Orde Baru yang digagas dalam KGM tahun 1972 dengan "falsafah" sikap positif-kreatif-kritis-realistis diperkembangkan substansinya mengikuti gagasan-gagasan teologi yang berkembang dalam kalangan ekumenis (DGD), yang sejak akhir tahun 1960-an didominasi wacana teologi-teologi dari gereja-gereja muda (dunia ke-3), termasuk Teologi Pembebasan dari kalangan Roma Katolik di Amerika Latin. Gagasan-gagasan peran gereja dalam masyarakat yang dimunculkan dalam gerakan ekumene mengalami perubahan penting setelah gerakan misi (IMC) digabungkan ke dalam DGD (SR New Delhi 1960). Prinsip-prinsip dan bentuk-bentuk peran yang relevan di dunia Barat moderen ternyata tidak cocok dengan kebutuhan dunia ke-3 yang menghadapi permasalahan-permasalahan negara dan masyarakat yang sangat kompleks.

Gagasan *responsible society* dijelaskan dalam KGM DGD tahun 1966 di Jenewa sebagai:

- (a) yang mengungkapkan fakta bahwa baik pemerintah maupun rakyat sama bertanggung jawab kepada Allah yang hidup;
- (b) mengungkapkan adanya tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat terhadap setiap warga masyarakat dan mengurus mereka yang terabaikan, didiskriminasi, atau menderita berbagai bentuk ketidakadilan;
- (c) memungkinkan setiap orang berkesempatan menjadi dirinya sendiri dan mengungkapkan hakekat dinamis dan kreatifnya sesuai norma-norma keadilan.

Tetapi gagasan ideal itu ditolak oleh para pemimpin gereja-gereja di dunia ke-3, karena tidak bisa diterapkan. Gagasan itu mengandaikan suatu masyarakat yang stabil, di mana dapat dikembangkan prosedur-prosedur demokratis yang normal. Pada hal di dunia ke-3 perlu suatu peralihan radikal dalam kekuasaan (*revolution*), mobilisasi visi (*ideology*), keterlibatan total (*praxis*), dan suatu fokus sejarah yang konkret (*contextualization*). SR DGD di Nairobi (tahun 1975, semula direncanakan di Jakarta) merumuskan suatu gagasan memperjuangkan masyarakat yang adil, partisipatif dan lestari (*just, participatory and sustainable society, JPSS*). JPSS kemudian diperkembangkan dari lingkup masyarakat (*society*) menjadi masalah seluruh ciptaan (*creation*). Sidang Raya DGD di Vancouver (1983) mencanangkan suatu komitmen bersama gereja-gereja terhadap *KPKC: keadilan, perdamaian dan keutuhan ciptaan (justice, peace, and integrity of*

creation, JPIC). Komitmen ini lebih dari hanya perumusan etika Kristen menjawab masalah-masalah masyarakat; ia adalah *pengakuan iman*. Di sini pengakuan "Yesus Kristus kehidupan dunia" (Yo 14:6) diterjemahkan menjadi panggilan Kristen menentang kuasa-kuasa dosa dan kematian dalam rasisme, seksisme, penindasan kasta, eksploitasi ekonomi, militerisme, pelanggaran hak-hak asasi manusia, dan penyalahgunaan iptek. Iman Kristen adalah kepedulian total kepada totalitas kehidupan.

JPSS dan pengembangannya menjadi JPIC membawa dampak penting bagi hubungan antarumat berbeda agama, yakni menjadi titik temu pergumulan bersama dalam fungsi agama-agama bagi kehidupan umat manusia. Kedua konsep ini juga menandai perubahan mendasar dalam pendekatan partisipasi gereja, yakni dari orientasi elitis (Yusuf-Daniel, mempengaruhi mereka yang berkuasa) ke perspektif kepedulian, yakni partisipasi dan solidaritas dalam perjuangan-perjuangan konkrit rakyat (Musa-Elia). Kata kunci partisipasi menyiratkan tindakan-tindakan nyata di tengah-tengah, bersama dan bagi rakyat banyak. Karena itu pendekatan partisipasi sosial gereja diungkapkan dalam istilah-istilah pendampingan (*advocacy*), pemberdayaan (*empowerment*) dan solidaritas (*solidarity*).

Partai Politik Kristen?

Partisipasi politik orang Kristen di Indonesia yang berlangsung sejak zaman pergerakan nasional dijalankan baik melalui partai politik Kristen maupun partai politik sekuler serta aktivitas politik di luar partai politik. Sekalipun kenyataan ini sudah berlangsung lama pertanyaan-pertanyaan mendasar masih perlu diajukan dalam konteks aktual Indonesia pasca-Reformasi. Relevankan menjalankan partisipasi politik dengan membentuk partai(-partai) Kristen di Indonesia dalam konteks sosial-politik dewasa ini?

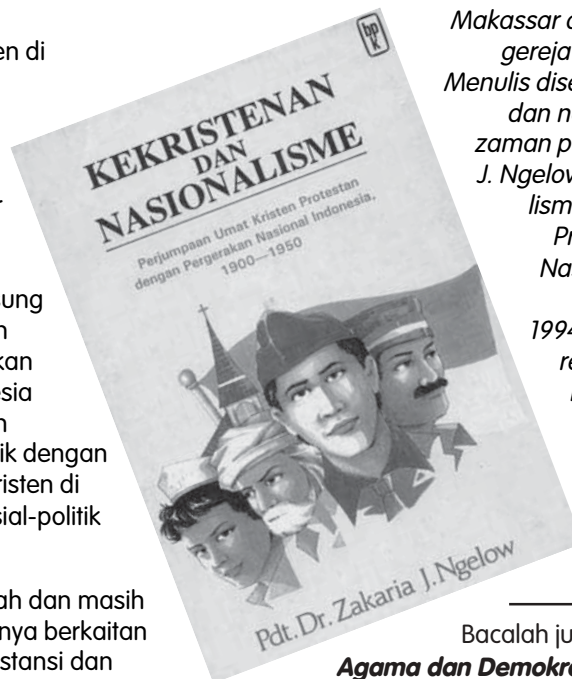
Argumentasi pro-kontra sudah dan masih terus berlangsung. Jawabannya berkaitan dengan sedikitnya 2 hal: substansi dan strategi perjuangan politik Kristen dan kelayakan sosialnya. Pertama, relevan kalau misi Kristen lebih baik (dan lebih berhasil) dijalankan di dalam suatu partai politik Kristen. Apa gerakan misi yang diusung partai(-partai) politik Kristen di

Indonesia dewasa ini? Adakah perbedaan bermakna kalau diperjuangkan melalui partai politik Kristen dengan partai politik yang bukan Kristen? Bagaimana kalau partisipasi di luar partai politik?

Hal yang kedua adalah analisis peluang partai politik Kristen untuk berkembang sehat dengan mempertimbangkan berbagai berbagai aspek dalam sejarah dan realitas politik, masyarakat, gereja dan Kekristenan Indonesia dewasa ini, termasuk sumber daya, dana dan jaringan pengorganisasiannya.

Setiap orang dapat mengemukakan pendapat dan argumentasinya. Substansi partisipasi politik Kristen bagi kehidupan yang adil, damai dan sejahtera tidak berbeda dengan idealisme yang ditawarkan partai-partai lainnya. Kecuali kalau partai politik Kristen kehilangan jati diri dan sekadar menjadi alat perjuangan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Sementara itu, kenyataan perpecahan serta 1001 kelemahan yang melanda gereja dan umat Kristen Indonesia mengarahkan pada kesimpulan bahwa partai politik Kristen tidak punya masa depan. Sebgab itu untuk konteks nasional kita dewasa ini berlaku semboyan, "Partisipasi politik Kristen, Yes! Partai politik Kristen, No!"

Dr. Zakaria J. Ngelow, pendeta Gereja Kristen di Sulawesi Selatan, adalah ketua STT Intim Makassar dan dosen di bidang sejarah gereja dan teologi agama-agama. Menulis disertasi mengenai Kekristenan dan nasionalisme Indonesia pada zaman pergerakan nasional (Zakaria J. Ngelow, Kekristenan dan Nasionalisme. Perjumpaan Umat Kristen Protestan dengan Pergerakan Nasional Indonesia, 1900-1950, BPK Gunung Mulia: Jakarta 1994). Artikel di atas merupakan revisi pengantar diskusi pada Konsultasi Gereja dan Politik PGI, Akademi Leimena, dan PARKINDO, Pondok Remaja PGI, Cipayung, Bogor, 18-22 Agustus 2003



Bacalah juga artikel Zakaria J. Ngelow, **Agama dan Demokrasi**, ceramah di International Conference on Democratic Challenges in Muslim Countries 27 Maret 2002 di Makassar. Artikel tersebut dapat diakses lewat Internet di homepage Jurnal INTIM (www.geocities.com/jurnalintim) atau di perpustakaan STT Intim Makassar (NetInText).